

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN ZINA DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)
2015**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun oleh:

WISNU ADITYA HARTONO
C 100.100.094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

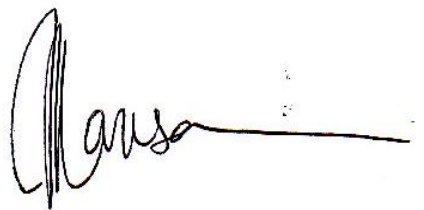
Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)



(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.)

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2016

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.


Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

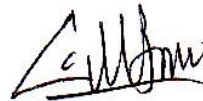


(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 25 Juli 2016
Penulis



Wisnu Aditya Hartono
C.100.100.094

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN ZINA DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)**

2015

WISNU ADITYA HARTONO

NIM : C.100.100.094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

Adityawisnu157@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan zaman, teknologi dan budaya yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema-problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan-pandangan, budaya-budaya serta kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang asing/orang barat mengenai kehidupan seksual yang terkesan bebas. Kerusakan moralitas yang terjadi saat ini dikarenakan semakin meningkatnya perbuatan perzinahan. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, melakukan zina bukan hanya pada saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi merupakan termasuk segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia. Pengaturan zina dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, sanksi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan pengaturan Zina dalam RUU KUHP 2015 diatur dalam Pasal 483 ayat (1), sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Kata kunci : Tindak Pidana Perzinahan, Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan, Sanksi Tindak Pidana Perzinahan

ABSTRACT

The current development, technology and culture are so quick nowadays, leading to new problems for legislators on how to protect people effectively and efficiently against the danger of demoralization as a result of perspectives, cultures and habits of foreign people/western people concerning seems like free sexual life. Morality damage which happen nowadays is because of the spreading adultery. Adultery is an sexual intercourse between a married person and a person who is not his or her spouse. Generally, adultery is not only when people do the sexual intercourse, but it is also every sexual activities leading to destroy human dignity. the adultery regulation in The Indonesian Criminal Code is provisioned on Article 284 section (1). It carries the maximum penalty is 9 (nine) months imprisonment. Whilst the regulation of adultery in The Draft Indonesian Criminal Code 2015 is provisioned on Article 483 section (1), the penalty for adultery offence carries a maximum penalty of 5 (five) years imprisonment.

Keywords: Crime of Adultery, Adultery Crime Regulations, The Penalty of Adultery

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, teknologi dan budaya yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya *demoralisasi* sebagai akibat masuknya pandangan, budaya serta kebiasaan dari orang asing/orang barat mengenai kehidupan seksual yang terkesan bebas. Padahal budaya atau kebiasaan tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga apabila hal itu masuk dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintahan dalam usahanya memelihara keamanan, ketertiban umum serta menjaga moralitas Negara Indonesia.¹

Kerusakan moralitas yang terjadi saat ini dikarenakan semakin meningkatnya perbuatan perzinaan. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laiki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, melakukan zina bukan hanya pada saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi merupakan termasuk segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia.²

Perzinaan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 284 KUHP. Ayat (1): “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Ke-1 a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. Ke-2: a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; b) Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu

¹ P.A.F Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, Hal 1.

² Pengertian Zina, Macam-Macam Zina, diakses dari <http://www.masuk-islam.com/pengertian-zina-dan-hukuman-bagi-pezina-lengkap-dengan-dalilnya.htm>, pada Tanggal 19 Januari 2016, Pukul 13.15 WIB.

padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya. Ayat (2): “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”. Ayat (3) “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75.” Ayat (4) “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.” Ayat (5) “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diundurkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.

Pasal 284 KUHP menyebutkan suatu peristiwa dianggap perzinahan bila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Menurut pendapat dari R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.³

Berdasarkan pada Pasal 284 KUHP tersebut, suatu tindak pidana perzinahan hanya dapat dilakukan tindakan hukum/penuntutan apabila adanya suatu pengaduan dari suami/istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan yang melakukan perbuatan zina. Karena Pasal 284 KUHP termasuk dalam jenis delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Dengan kata lain tanpa

³ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Hal 65-66.

adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.⁴

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015 tentang zina dan pembuat cabul dijelaskan bahwa hukuman zina dan pembuat cabul akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini tentu penyempurnaan dari KUHP yang sudah ada. Ini menjadi landasan hukum untuk mencegah perzinahan dan perbuatan cabul di Indonesia, seluk beluk hukum zina dan pembuat cabul sudah bisa menjamin kesusilaan, terlihat dari pasal-pasal dalam RUU KUHP 2015 sebagai contoh Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015, bagian lima yang berbunyi: laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dipidana penjara 5 (lima) tahun.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, Bagaimanakah pengaturan zina dalam KUHP dan RUU KUHP 2015?; Bagaimanakah sanksi zina dalam KUHP dan RUU KUHP 2015?

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah: (1) Untuk mengetahui pengaturan zina dalam KUHP dan RUU KUHP 2015. (2) Untuk mengetahui sanksi zina dalam KUHP dan RUU KUHP 2015.

Manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara

⁴ Sugandi R, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, Hal 302.

lengkap mengenai pengaturan dan ancaman zina dalam KUHP dan RUU KUHP 2015.

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan metode normative, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP dan RUU KUHP 2015 mengenai tindak pidana perzinaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.⁶ Karena dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan pengaturan zina yang terdapat pada KUHP dan RUU KUHP 2015.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primernya meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan, jurisprudensi dan

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 118.

⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada, Hal 35.

literature lainnya yang berkaitan dengan Studi Komparasi Pengaturan Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP dan RUU KUHP 2015

Zina berasal dari bahasa arab yaitu zanah yang artinya persenggamaan antara laki-laki perempuan yang tidak terikat pernikahan. Secara harfiah zina berarti perbuatan yang keji. Dalam pengertian istilah zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lainnya tidak terikat hubungan perkawinan.⁷

Peraturan zina dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinaan ada dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:⁸

Ayat (1): “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Ke-1: (a) Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (b) Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Ke-2: (a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah; (b) Seorang tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat (2): “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti

⁷ Hukum Perzinahan, Diakses dari <https://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-perzinahan-menurut-pandangan-islam/>, Pada tanggal 09 Februari 2016, Pukul 06.36 WIB.

⁸ Sugandi, R, *Loc.Cit.*, Hal 27.

dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”. Ayat (3) “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.” Ayat (4) “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.” Ayat (5) “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.

Dari pengaturan yang disebutkan diatas dalam Pasal 284 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana Perzinahan adalah suatu perbuatan melakukan hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku yang telah kawin atau salah satunya terikat dalam perkawinan sebagaimana dalam Pasal 27 BW. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan.

Menurut P.A.F Lamintang Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan *opzetteleijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, itu berarti bahwa unsur kesengajaan harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf-huruf a dan b dan angka 2 huruf a dan b KUHP.⁹

Mr Modderman mengemukakan bahwa perzinahan kemudian telah dicantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang sedang dibentuk, dan bagi wanita itu telah diberikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak

⁹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, Hal 88-89.

pidana perzinahan, melainkan juga dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan dan mengajukan gugatan perceraian, jika mereka itu merasa perlu berbuat demikian, karena dilakukannya perzinahan oleh suami mereka dengan wanita lain atau karena telah dilakukannya perzinahan oleh isteri mereka dengan laki-laki lain.¹⁰

Tindak pidana perzinahan mendapat perhatian dalam RUU KUHP 2015 dengan adanya penambahan-penambahan pasal baru yang mengatur mengenai perzinahan. Berikut isi dari RUU KUHP 2015 yang mengatur soal perzinahan:¹¹

Pertama, Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

(a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; (d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau (e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Kedua, Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

Ketiga, Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

¹⁰ *Ibid.*, Hal 91.

¹¹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen HUKUM dan HAM, 2002, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Hal 16.

ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. *Keempat*, Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dari pengaturan yang disebutkan diatas dalam Pasal 483 RUU KUHP 2015, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana Perzinahan suatu perbuatan melakukan hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku yang telah kawin atau salah satunya terikat dalam perkawinan, dalam Pasal ini spesifikasi tindak pidana zina diperluas yaitu diperuntukkan juga terhadap seseorang laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Ketentuan Sanksi Bagi Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP dan RUU KUHP 2015

Sanksi Pidana akan memperlihatkan pengertian, tujuan, dan macam-macam sanksi pidana yang terdapat baik di dalam KUHP maupun RUU KUHP 2015. Sanksi pidana merupakan masalah pokok ketiga dalam hukum pidana, (masalah pokok yang pertama yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, dan masalah pokok yang kedua yakni pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan) sebenarnya merupakan sarana atau instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Dengan demikian sanksi pidana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.¹²

Terkait bahasan mengenai sanksi bagi tindak pidana zina baik dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP 2015. Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan" dengan demikian bagi seseorang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 284 KUHP

¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS, Hal 314

atau telah melakukan kejahatan kesusilaan, maka sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut maka akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ketentuan sanksi atas tindak pidana zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tersebut telah sesuai dengan pendapat H.L.A Hart dimana yang menyebutkan bahwa karakteristik pidana adalah:¹³ (1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. (2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau di sangka benar melakukan tindak pidana. (3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum. (4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana. (5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Selain telah sesuai dengan pendapat H.L.A Hart,¹⁴ juga telah sesuai dengan pendapat Muladi yang menyebutkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:¹⁵ (1) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. (2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan. (3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sanksi bagi tindak pidana zina dalam RUU KUHP 2015 telah disebutkan dalam Pasal 483 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman sanksi dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP jelas terlihat berbeda dengan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015. Bagi

¹³ *Ibid.*, Hal 317.

¹⁴ *Ibid.*, Hal 316.

¹⁵ *Ibid.*, Hal 318.

sesorang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 483 RUU KUHP 2015 atau telah melakukan kejahatan kesusilaan yaitu tindak pidana zina, sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, dimana sanksi bagi tindak pidana zina dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015 telah sesuai dengan pendapat H.L.A Hart dan Muladi keduanya menyebutkan karakteristik dari pidana atau sanksi yang mana karakteristik dari sanksi itu mengandung penderitaan nestapa atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Karena sanksi bagi tindak pidana zina yang dikenakan dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015 yakni dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, merupakan hukuman yang tidak menyenangkan dan mengandung kesengsaraan.

Dengan demikian agar tercapainya tujuan dari hukum pidana tersebut menurut penulis untuk ketentuan sanksi yang dikenakan bagi tindak pidana zina sebaiknya mencantumkan ketentuan sanksi tindak pidana zina dalam RUU KUHP 2015, dimana dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015 ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan ketentuan sanksi tindak pidana zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Karena dengan melihat ancaman pidananya lebih berat diharapkan masyarakat lebih tunduk akan suatu peraturan tersebut, dan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana zina dengan didakwa pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara selama paling lama 5 (lima) tahun diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan zina dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinahan ada dalam Pasal 284 KUHP. Dari pengaturan yang disebutkan diatas dalam Pasal 284 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana Perzinahan merupakan suatu perbuatan melakukan hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku yang telah kawin atau salah satunya terikat dalam perkawinan sebagaimana dalam Pasal 27 BW. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan. Pelaku Zina dalam pengaturan Pasal 284 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan

Tindak pidana perzinahan mendapat perhatian dalam RUU KUHP 2015 dengan adanya penambahan-penambahan pasal baru yang mengatur mengenai perzinahan. Berikut isi dari RUU KUHP 2015 yang mengatur soal perzinahan:¹⁶ *Pertama*, dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: (a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; (d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada

¹⁶ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen HUKUM dan HAM, 2002, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Hal 16.

dalam ikatan perkawinan; atau (e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Ketiga, Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. Keempat, Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dapat kita lihat bahwa Pasal 284 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa sanksi yang melakukan tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan sanksi bagi tindak pidana zina yang diatur dalam RUU KUHP 2015 telah disebutkan dalam Pasal 483 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa sanksi yang dikenakan bagi tindak pidana zina dalam RUU KUHP 2015 ancaman pidananya lebih berat dibandingkan sanksi yang dikenakan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Dengan demikian agar tercapainya tujuan dari hukum pidana tersebut menurut penulis ketentuan sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana zina sebaiknya menggunakan RUU KUHP 2015, dimana dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015 ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan ketentuan sanksi tindak pidana zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Karena dengan melihat ancaman pidananya lebih berat yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun diharapkan masyarakat lebih tunduk akan suatu peraturan tersebut dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

Pertama, ditujukan kepada orang tua diharapkan pencegahan tindak pidana perzinahan dapat dilakukan dengan cara pembinaan moralitas dan mental kepada setiap individu sejak usia dini, yaitu dapat dengan cara memberikan dan membekali pemahaman mengenai ilmu keagamaan, karena dengan memiliki keimanan yang kuat dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang negative yang dilarang oleh agama dan undang-undang.

Kedua, ditujukan kepada setiap warga masyarakat diharapkan dalam lingkup kehidupan kemasyarakatan itu sendiri memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap anak-anak dan remaja terkait bahanya melakukan perbuatan zina yang dapat merusak moralitas dan mental seorang individu.

Ketiga, ditujukan kepada pembentuk undang-undang diharapkan dapat membuat peraturan mengenai tindak pidana perzinahan yang memiliki ancaman hukuman lebih berat/ yang sepantasnya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana zina.

Keempat, ditujukan kepada pihak aparat penegak hukum sebaiknya tidak main-main dalam menangani kasus tindak pidana perzinahan serta juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan memberikan seminar-seminar atau sosialisasi kepada masyarakat secara umum tentang bahayanya tindak pidana yang menyangkut dengan kesusilaan, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali tindak pidana yang menyangkut dengan kesusilaan, baik itu perzinahan, perkosaan, maupun pencabulan. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi jumlah kejahatan/tindak pidana yang menyangkut dengan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

Lamintang, P.A.F, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS.

Sugandi, R, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Depatemen HUKUM dan HAM, 2012, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta.

Pengertian Zina, Macam-Macam Zina, diakses dari <http://www.masuk-islam.com/pengertian-zina-dan-hukuman-bagi-pezina-lengkap-dengan-dalilnya.htm>, pada Tanggal 19 Januari 2016, Pukul 13.15 WIB.

Hukum Perzinahan, Diakses dari <https://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-perzinahan-menurut-pandangan-islam/>, Pada tanggal 09 Februari 2016, Pukul 06.36 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015